

REKOMENDASI dari Rakernas ARSADA

Entrepreneurship Manajemen RSD menuju Persaingan Global

Rakernas VII

Tahun 2012 ini Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) melaksanakan Rapat Kerja Nasional ke 7 yang bertempat di Batam, Kepulauan Riau.



Tantangan bagi para manajer Rumah Sakit Daerah

Meskipun UU No 44/2009 telah mewajibkan seluruh RS pemerintah dikelola sebagai BLU/BLUD, namun masih banyak RSD yang belum mempersiapkan diri untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan tersebut. Hal yang melatarbelakangi adalah ketidaksiapan RS yang bersangkutan, ketidaksiapan Pemda, maupun ketidaksiapan keduanya.

Memang untuk menerapkan PPK BLU(D) dibutuhkan manajer (mulai dari Direktur hingga manajer menengah dan bawah) yang memiliki jiwa entrepreneur yang kuat sekaligus seorang innovator. Direktur RSUD harus bisa memimpin perubahan dari pola (pikir dan kerja) lama ke pola yang baru. Manajer RS harus mampu membawa RSD keluar dari situasi penuh kesulitan ke situasi penuh kesempatan.

Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh para manajer RSD, antara lain menyusun system remunerasi, mengoptimalkan peran komite medic, menyiapkan system pelayanan untuk menghadapi SJSN, dan sebagainya.

Tujuan Khusus

- Pertama Terciptanya pemahaman entrepreneurship manajemen RSD
- Kedua Terwujudnya kesiapan RSD menghadapi pelaksanaan SJSN
- Ketiga Terwujudnya pemahaman RSD ttg Organisasi Komite Medik
- Keempat Terwujudnya kesiapan RSD menghadapi sengketa medik
- Kelima Terciptanya pemahaman tentang Remunerasi di RSD



Tujuan umum kegiatan ini adalah membantu terciptanya entrepreneurship manajemen RS Daerah menghadapi persaingan global.

Rekomendasi Rapat Kerja Nasional VII ARSADA terkait implementasi PPK BLUD

Setelah memperhatikan dan menelaah aspirasi yang berkembang pada Rakernas VII ARSADA dan memperhatikan tema Rakernas kali ini, maka ARSADA memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Peran ARSADA sebagai advocator dan fasilitator terkait penerapan PPK BLUD telah dirasakan oleh anggota, namun perlu ditingkatkan lagi agar terjadi akselerasi penerapan BLUD sehingga sebelum berlakunya SJSN per 1 Januari 2014 semua RSD telah menerapkan PPK BLUD.
- b. RSD segera menetapkan standar pelayanan dan indicator mutu pelayanan sesuai dengan esensi BLUD yaitu peningkatan pelayanan melalui pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan.
- c. RSD BLUD agar mengantisipasi adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan sehubungan dengan perkembangan situasi daerah masing-masing.



Ketua ARSADA Pusat
dr. Kuntjoro A. Purjanto, MMR

ARSADA dan ADINKES

Dalam rangka melaksanakan rekomendasi yang telah dihasilkan tersebut, ARSADA dan ADINKES perlu duduk bersama untuk memetakan kemungkinan masalah yang dapat timbul danantisipasi terhadap dampaknya.



Rekomendasi terkait berlakunya system SJSN

1. ARSADA siap berperan aktif dengan memberikan sumbang saran tentang petunjuk pelaksanaan SJSN
2. Kebijakan untuk pelaksanaan SJSN tetap memperhatikan keberpihakan yang berimbang pada 3 pilar utamanya, yaitu masyarakat sbg penerima pelayanan, RSD sbg salah satu PPK dan BPJS sbg pengelola keuangan, dan masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
3. Seluruh RSD sbg anggota ARSADA selalu berdiskusi bersama organisasi profesi terkait untuk persiapan dimulainya SJSN khususnya dalam penghitungan tarif pelayanan agar tidak mengganggu likuiditas keuangan RSD.





PMPK FK UGM,
Gd. IKM Sayap Utara Lt. 2
Jln. Farmako, Sekip Utara
Jogjakarta, 55281

